

EXECUTIVE SUMMARY
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR
KEPULAUAN MALUKU

A. Latar Belakang

Penyusunan rencana induk ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kepulauan Maluku melalui penyusunan rencana infrastruktur yang terintegrasi, khususnya infrastruktur PUPR. Dengan tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Kepulauan Maluku.

Penyusunan Rencana ini juga melihat potensi Kepulauan Maluku selain untuk pengembangan kawasan strategis dan Kawasan ekonomi khusus, juga merupakan bentuk komitmen Bangsa Indonesia dalam Kerjasama Ekonomi Subregional yaitu: BIMP-EAGA (Brunei Darusaalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asean (growth Area) yang merupakan kerjasama diantaranya dalam pengembangan infrasturktur konektivitas serta AIDA (Australian Indonesian Development Area. Dimana kerjasama AIDA ini merupakan kerjasama regional sosial ekonomi yang dijalin antara Propinsi Northern Australia dengan delapan provinsi di Indonesia Timur termasuk provinsi-provinsi di kawasan Kepulauan Maluku.

B. Profil Kepulauan Maluku

Sebagai wilayah kepulauan dengan luas daratan 77.990 km² dan luas perairan mencapai 776.500 km², Kepulauan Maluku memiliki kekayaan alam berupa sumber daya hayati laut dan sumber daya pesisir yang sangat melimpah. Bahkan potensi ikan tuna di wilayah ini menjadi yang terbesar di dunia. Disamping itu, sektor pertanian dan pertambangan juga menjadi sumber ekonomi utama wilayah. Hasil tambang yang dihasilkan oleh pulau ini adalah nikel, khususnya di Maluku Utara. Namun, potensi-potensi yang dimiliki oleh kepulauan ini belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Untuk memperlancar aktivitas ekonomi dari hulu hingga ke hilir, keberadaan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi mutlak diperlukan. Ketersediaan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan juga sebagai akses transportasi untuk pengelolaan maupun pemasaran produksi masyarakat. Terlebih lagi geografis wilayahnya yang berupa kepulauan akan membutuhkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, terutama antara transportasi darat dan laut. Sementara itu, infrastruktur lainnya seperti infrastruktur air bersih, permukiman, dan energi juga diperlukan untuk menunjang segala bentuk aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur di Pulau Maluku harus berdasarkan pengembangan gugus pulau. Kondisi infrastruktur pulau-pulau di bagian timur Indonesia memang relatif tertinggal

dibandingkan dengan pulau-pulau di bagian tengah dan barat. Hal ini menjadi salah satu kendala investasi di wilayah ini sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah berjalan lambat. Di samping itu, wilayahnya yang berupa kepulauan menyebabkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas produksi dan perdagangan menjadi relatif lebih mahal.

Di Kepulauan Maluku dengan segala kekayaan SDA-nya, terdapat salah satu kawasan yang sedang dikembangkan yaitu Kawasan Morotai, dimana menurut PP No 50 tahun 2014 ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, KEK Morotai terdiri atas zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri dan zona pariwisata dimana membutuhkan dukungan dalam pengembangan infrastruktur wilayah.

1. Provinsi Maluku Utara

Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3^o Lintang Utara sampai 3^o Lintang Selatan dan 124^o – 129^o Bujur Timur serta terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 Km dan dari barat ke timur sepanjang 660 Km. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan sebesar 145.801,1 Km² dimana luas wilayah daratan 45.069,66 Km² (23,72 persen) dan wilayah perairan seluas 100.731,44 Km² (76,28 persen) dengan panjang garis pantai sepanjang 3.104 Km. Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut memiliki 395 buah pulau terdiri dari 64 buah berpenghuni dan 331 buah tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera (18.000 Km²) dan pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 Km²) dan Pulau Taliabu (3.195 Km²), Pulau Bacan (2.878 Km²) dan Pulau Morotai (2.325 Km²). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya.

Gambaran perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara tercermin dari nilai PDRB-nya. Perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara besarnya Rp 9,12 triliun pada tahun 2013.

2. Provinsi Maluku

Letak geografis Provinsi Maluku terletak diantara 2^o 30' - 9^o Lintang Selatan dan 124^o - 136^o Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah Provinsi Maluku yang menyangkut luasan wilayah keseluruhan adalah wilayah darat dan laut, dimana sekitar 90 persen wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. Sedangkan kawasan daratnya hanya 10 persen berupa pulau-pulau besar dan kecil. Setelah mengalami proses pemekaran wilayah kabupaten hingga tahun 2006, maka wilayah administrasi Maluku terbagi atas 7 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah keseluruhan 52 kecamatan.

Menurut catatan statistik jumlah penduduk Provinsi Maluku tahun 2014 adalah sebanyak 1.628.413 jiwa. Jika dibandingkan terhadap luas wilayah Provinsi Maluku

sebesar 54.185 Km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 30,05 jiwa per Km². Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Ambon yaitu 1006,94 jiwa per Km².

1. Regional

Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari. Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid.

2. Kependudukan

I. Provinsi Maluku Utara

Secara umum apabila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk nasional, maka Provinsi Maluku Utara tergolong daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Hal ini menyebabkan daerah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran pemerataan penduduk di Indonesia, khususnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa. Selain itu sebagian penduduk juga melakukan migrasi keluar (out-migration) atau mengungsi ke wilayah lain karena alasan keamanan. Selang beberapa tahun, pada kondisi pasca-konflik di mana kondisi sosial keamanan kembali kondusif, maka terjadi migrasi kedalam (inmigrasi) yang mana adanya perpindahan kembali penduduk ke wilayah sekitar pada masa-masa konflik sebelumnya yang juga disertai dengan perpindahan tenaga kerja sejalan dengan kembali normalnya kegiatan ekonomi.

II. Provinsi Maluku

Secara umum apabila diperbandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk nasional, maka Provinsi Maluku tergolong daerah yang jarang penduduknya (tidak padat). Hal ini menyebabkan daerah Maluku menjadi salah satu sasaran pemerataan penduduk di Indonesia, khususnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa bagian timur.

3. Ekonomi

Gambaran perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara tercermin dari nilai PDRB-nya. Perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara besarnya Rp 9,12 trilliun pada tahun 2013.

Sedangkan gambaran perekonomian wilayah Provinsi Maluku tercermin dari nilai PDRB-nya. Perekonomian wilayah Provinsi Maluku besarnya Rp 13,48 trilliun pada tahun 2013.

4. Potensi

I. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan Kepulauan Maluku

Perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan untuk wilayah kepulauan maluku, selain pariwisata. Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan ditetapkan oleh Menteri KKP (Fadel Mohammad) sebagai Lumbung Ikan Nasional 2030 sejak digelarnya Sail Banda 2010 yang berbasis pada potensi sumberdaya wilayah kepulauan dan karakteristik wilayah serta tetap mengacu pada penetapan PERPRES No 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku sebagai wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut danpulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian tersebut.

II. Peran strategis sektor pertanian selain berfungsi sebagai penyediaan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan andalan penyumbang devisa non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan tingginya jumlah penduduk yang bergerak pada sektor ini menunjukkan bahwa peran sektor pertanian bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga dalam rangka menjalankan fungsi sosial dan stabilitas politik keamanan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk pertanian juga semakin meningkat dan beragam. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, untuk itu selama lima tahun ke depan (2015-2019) Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara menargetkan pencapaian peningkatan produksi komoditas utama pertanian. Pencapaian peningkatan produksi komoditas pangan utama pada tahun 2019 diantaranya padi dengan target sasaran produksi 99,378 ton, Kedelei 2,028 ton dan jagung 36,579 ton jagung pipilan kering, peningkatan produksi komoditas Perkebunan dengan target sasaran

produksi sebesar 306,805 ton, komoditas Hortikultura sebesar 121,829 ton dan komoditas Peternakan sebesar 20,904 Ton.

Selain upaya untuk mencapai peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu. Selama 2015-2019, konsumsi beras ditargetkan turun 1,5 persen/tahun, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran. Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga diupayakan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 93,3 pada tahun 2014 menjadi 100,2 pada tahun 2019.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya system perbenihan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, menciptakan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus,

memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pelaksanaan pembangunan pertanian 2015-2019 tidak hanya menjadi ranahnya Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagaimana fungsi dan tugas pokok sebagai pelaksana program dan kegiatan, namun keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau instansi teknis lain, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/Kota, sektor swasta (dunia usaha), perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Mencermati berbagai potensi dan permasalahan pelaksanaan pembangunan pertanian periode sebelumnya serta peluang, tantangan dan target sasaran pembangunan pertanian lima tahun kedepan maka diperlukan kecermatan dalam menentukan rencana strategis pembangunan pertanian periode selanjutnya, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 2015-2019. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang berfungsi sebagai acuan dan arah kebijakan bagi seluruh sub sektor pertanian lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik kedalam dalam maupun antar sektor terkait.

III. Potensi Pengembangan Kawasan Parwisata Kepulauan Maluku

Pariwisata adalah sebuah kegiatan dimana dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang dalam suatu perjalanan yang mana dapat melebihi 24 jam dari tempat tinggalnya. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Faktor-faktor pendorong pengembangan pariwisata adalah:

- i. berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu lalu

- ii. Kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten;
- iii. Merosotnya nilai ekspor pada sektro nonmigas; dan
- iv. Besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga tidak merusak lingkungan bahkan sebaliknya merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau obyek wisata.

Sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya. Ditambahkan pula bahwa Indonesia yang memiliki keragaman sumberdaya yang tersebar pada ribuan pulau, dengan lautannya yang luas memiliki potensi yang baik untuk kegiatan pariwisata.

Kepariwisataan Kepulauan Maluku ditunjang oleh potensi kondisi alam dan benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu sehingga wisata budaya dan purbakala, wisata alam, dan wisata bahari dapat dikembangkan di Kepulauan Maluku. Wisata alam meliputi :

- i. Wisata hutan,
- ii. Wisata bahari baik berupa wisata pantai maupun wisata taman laut,
- iii. Wisata pertanian, wisata cagar alam,
- iv. Ketersediaan daya tarik bawah laut sesuai dengan karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan,
- v. Gunung api,
- vi. Gunung api bawah laut,
- vii. Daerah perbukitan,
- viii. Pemandangan alam,
- ix. Teluk, Danau dan
- x. Keramah-tamahan masyarakat Maluku yang sudah dikenal sejak dahulu dengan tradisi masyarakat yang menganggap Wisatawan Sebagai Raja.

IV. Pertambangan

Potensi pertambangan yang ada di Kepulauan Maluku antara lain :

- Kabupaten Halmahera Utara
 - Emas: 87.7 gr/ Ton
 - Mangan: 221.553 Ton

- Pasir Besi: 10 Juta Ton
- Panas Bumi: 30 MW
- Minyak Bumi: 0.0072 Juta Barel
- Gas Bumi: 0.0018 TSCF
- Kabupaten Halmahera Barat
 - Kaolin: 5.100.000 m³
 - Panas Bumi: 139 MW
 - Diatomit: 10 Ha
- Kabupaten Halmahera Timur
 - Nikel: 42.763.460 Ton
 - Minyak Bumi: 0.0430 Juta Barel
 - Gas Bumi: 0.0108 TSCF
- Kabupaten Halmahera Tengah
 - Pasir Besi: 1.140 Ton
- Kabupaten Halmahera Selatan
 - Emas: 0.36-62 gr/ Ton
 - Nikel: 47.898 Ha
 - Tembaga: 6 Juta Host Rock
 - Pasir Besi: 88 Juat Ton
 - Panas Bumi: 185 MW
 - Minyak Bumi: 0.1224 Juta Barel
 - Gas Bumi: 0.189 TSCF
- Kota Tidore Kepulauan
 - Panas Bumi 15 MW
- Kabupaten Kepulauan Sula
 - Emas (Cadangan) 72 Juta Ton

V. Kebencanaan

Indeks bencana banjir pada Kepulauan Maluku ini memiliki resiko sedang dan tinggi. Sedangkan untuk bencana erupsi paling tinggi berada pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemudian untuk bencana gempa bumi, Kepulauan Maluku ini berkisar rata – rata sedang sampai tinggi. Untuk bencana lingsor sendiri paling tinggi ada pada kabupaten Huru dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

VI. Pelabuhan, Bandara dan Infrastruktur Lainnya

Letak dari Infrastruktur lainnya

Pelabuhan Pengumpan Regional : - Kabupaten Daruba,

- Kabupaten Jailolo

Pelabuhan Utama: - Pelabuhan Achmad Yani, Ternate

- Pelabuhan Sofifi

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon: - Pelabuhan Utama Internasional

- Bandar Udara Pengumpul:
- Bandar Udara Pattimura
 - Bandar Udara Bandaneira
 - Bandar Udara Dobo
 - Bandar Udara Babullah
 - Bandar Udara Amahai

VII. Dukungan Infrastruktur PUPR terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Antar WPS

- A. Wilayah Pengembangan Prioritas Daruba
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai
 - BM: Pengembangan jaringan jalan lingkar Daruba (Daeo - Bere-bere)
 - CK: pebangunan SPAM di Kawasan Daruba
- B. Wilayah Pengembangan Prioritas Ternate – Sofifi – Tidore
 - SDA: Pengendali banjir di Ternate, penyediaan Air Baku, pengaman pantai
 - BM: Pengembangan dan Peningkatan Fungsi jalan Lingkar Pulau Ternate (Ternate-Kastelo-Pintu Besar – Ternate)
 - CK: SPAM di Kawasan Ternate
- C. Wilayah Pengembangan Prioritas Masohi
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai
 - BM: Pengembangan jaringan jalan strategis nasional lintas pulau seram (Taniwel – Piru – Kairatu), pembangunan Jalan Trans Maluku Ruas Lingkar Barat Pulau Seram (Kairatu – Piru – Taniwei – Lisabota – Saleman)
 - CK: SPAM di Kawasan Masohi
- D. Wilayah Pengembangan Prioritas Tual – Kepulauan Aru
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai
 - BM: Pembangunan jaringan jalan Trans Maluku (Kab. Kep. Aru – Tual)
 - CK: SPAM di Kawasan Tual dan Kep. Aru
- E. Wilayah Pengembangan Prioritas Tobelo – Jailolo
 - SDA: Penyediaan Air Baku
 - BM: Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli – Jailolo – Goal – Kedi – Galela)
 - CK: SPAM di Kawasan Tobelo - Jailolo
- F. Wilayah Pengembangan Prioritas Labuha

- SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai,
- BM: Pengembangan dan peningkatan ruas jalan (Babang – Labuha)
- CK: SPAM di Kawasan Labuha
- G. Wilayah Pengembangan Prioritas Sula
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai,
 - BM: Pembangunan Jaringan Jalan (Sanana – Pohea)
 - CK: SPAM di Kawasan Sula
- H. Wilayah Pengembangan Prioritas Buru
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai,
 - BM: Pengembangan Jaringan jalan (Teluk Bara – Air Buaya – Samalagi – Namlea – Maloso – Mako – Modauhohe – Namrole)
 - CK: SPAM di Kawasan Buru
- I. Wilayah Pengembangan Prioritas Wetar – Yamdenah
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai,
 - BM: Pembangunan jaringan jalan Trans Maluku (Kabupaten Tenggara Barat – Kabupaten Bara Daya)
 - CK: SPAM di Kawasan Wetar Yamdenah
- J. Wilayah Pengembangan Prioritas Ambon
 - SDA: Penyediaan air baku, pengaman pantai,
 - BM: Pengembangan Jalan Tran Maluku ruas lingkaran Pulau Ambon (Laha – Alang Wukasibu – Asilulu – Kaitehu Hitu – Morela – Liang)
 - CK: SPAM di Kawasan Wetar Yamdenah

III. Rencana Keterpaduan Infrastruktur PUPR Kepulauan Maluku

1. Ultimate 2025

- SDA
 - Penahan Ombak Pantai Selatan Morotai Selatan sepanjang 3000 m
 - Bendungan Way Apu
- BM
 - Jalan Trans Maluku Ruas Leksuka – Namrole (P. Buru), Lingkaran Selatan dan Timur Pulau Seram, ruas lingkaran Pulau Ambon
 - Jalan Lingkaran Halmahera Bagian Utara
 - Jalan Lingkaran Halmahera Bagian Tengah dan Selatan
- CK
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman 150 Ha
- PnP
 - Pembangunan 10 Rumah Susun dan 12.169 Unit

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR.